



POLA KONSUMSI DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN PROVINSI BALI 2014



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BALI**





hiv.ilo.gov.go.id

POLA KONSUMSI DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN PROVINSI BALI 2014



POLA KONSUMSI DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN PROVINSI BALI 2014

ISSN : 2356-4652
Katalog BPS : 3206001.51
Nomor Publikasi : 51522.1503
Ukuran Buku : 14,8 cm x 21 cm
Jumlah Halaman : xii + 63 halaman
Naskah : BPS Provinsi Bali

Tim Penyusun Naskah :

- Penanggung Jawab Umum : Panusunan Siregar
- Penanggung Jawab Teknis : Indra Susilo
- Koordinator : Anak Agung Gede Dirga Kardita
- Anggota : Rando Carrolina

Penyunting : Bidang Statistik Sosial
Gambar Kulit : Bidang Integrasi Pengolahan & Diseminasi Statistik
Sumber Gambar : jalandamai.org, papiwasthere.files.wordpress.com,
greendelightuae.com, penggagas.com,
blog.joslin.org, hospitalityinfocentre.co.uk
Diterbitkan Oleh : BPS Provinsi Bali

*Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau
menggandakan sebagian atau seluruh isi buku untuk tujuan komersial tanpa
izin tertulis dari Badan Pusat Statistik*

KATA PENGANTAR

Publikasi “Pola Konsumsi dan Distribusi Pendapatan Provinsi Bali 2014” memuat beberapa indikator terkait dengan tingkat kesejahteraan rakyat. Beberapa hal dibahas dalam publikasi ini, meliputi rata-rata pengeluaran per kapita per bulan, pola konsumsi, dan distribusi pendapatan penduduk Provinsi Bali. Ketiga indikator tersebut secara umum mampu menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk Provinsi Bali.

Diharapkan publikasi “Pola Konsumsi dan Distribusi Pendapatan Provinsi Bali 2014” ini dapat dijadikan sebagai alat monitoring dan evaluasi bagi pelaksanaan pembangunan, serta sebagai pedoman bagi perencanaan pembangunan di masa mendatang.

Disadari bahwa dalam publikasi ini masih terdapat kekurangan, untuk itu saran perbaikan sangat diharapkan guna penyempurnaan publikasi berikutnya.

Denpasar, November 2015
Badan Pusat Statistik Provinsi Bali
Kepala,



Panusunan Siregar



PANGAWEJANG STATISTIK

1. Membangun itu sulit, tetapi jauh lebih sulit melaksanakan pembangunan tanpa dukungan data statistik.
2. Data yang baik, akurat, bebas bias, dan terpercaya adalah data yang dikumpulkan berdasarkan metodologi statistik yang jelas dan benar.
3. Jangan pernah mengharapkan bahwa setiap data yang dikumpulkan itu, seratus persen benar sekalipun metodologi statistiknya sudah benar, karena data itu masih dikumpulkan oleh manusia.
4. BPS dalam setiap melakukan pengumpulan data, memiliki prinsip bahwa data yang dikumpulkan itu pasti mengandung kesalahan, tetapi dalam melaporkan dan mendiseminasikan datanya BPS tidak melakukan kebohongan.
5. Data bagaikan Kompas dan Pelita.

copyright@panusunan_siregar

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	iii
PANCAWEJANG STATISTIK.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Penulisan	3
1.3. Sumber Data.....	4
BAB II. METODOLOGI	5
2.1. Ruang Lingkup	5
2.2. Kerangka Sampel.....	6
2.3. Desain Sampel.....	6
2.4. Metode Pengumpulan Data.....	7
2.5. Pengolahan.....	7
2.6. Metode Analisis.....	8
2.6.1. Gini Ratio.....	8
2.6.2. Kriteria Bank Dunia	9
2.6.3. Kurva Lorenz.....	10
BAB III. KONSEP DAN DEFINISI	13
BAB IV. PEMBAHASAN	15
4.1. Pengeluaran per Kapita Penduduk	15
4.2. Pola Konsumsi Penduduk	20
4.2.1. Konsumsi Makanan	25
4.2.2. Konsumsi Non Makanan	31
4.3. Distribusi Pendapatan	36
4.3.1. Distribusi Pendapatan Provinsi Bali	37
4.3.2. Distribusi Pendapatan Menurut Kabupaten/Kota.....	41
BAB V. PENUTUP	47
LAMPIRAN	49

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 1. Rata-rata Pengeluaran per Kapita per Bulan Penduduk Menurut Klasifikasi Daerah di Provinsi Bali, 2012—2014	16
Tabel 2. Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Rata-rata Pengeluaran per Kapita per Bulan di Provinsi Bali, 2014.....	18
Tabel 3. Pengeluaran Rata-rata per Kapita per Bulan Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Pengeluaran di Provinsi Bali, 2012—2014.....	22
Tabel 4. Rata-Rata Konsumsi per Kapita per Bulan Penduduk Menurut Kelompok Pengeluaran dan Jenis Pengeluaran di Provinsi Bali, 2014.....	25
Tabel 5. Proporsi Pengeluaran per Kapita per Bulan Penduduk Menurut Sub Kelompok Makanan dan Klasifikasi Daerah di Provinsi Bali, 2014.....	27
Tabel 6. Persentase Rata-rata Pengeluaran per Kapita per Bulan Penduduk Menurut Sub Kelompok Makanan dan Kelompok Rata-rata Pengeluaran di Provinsi Bali, 2014.	29
Tabel 7. Proporsi Pengeluaran per Kapita per Bulan Penduduk Menurut Sub Kelompok Non Makanan dan Klasifikasi Daerah di Provinsi Bali, 2014.....	33
Tabel 8. Persentase Rata-rata Pengeluaran per Kapita per Bulan Penduduk Menurut Sub Kelompok Non Makanan dan Kelompok Rata-rata Pengeluaran di Provinsi Bali, 2014.	35
Tabel 9. <i>Gini Ratio</i> Menurut Klasifikasi Daerah di Provinsi Bali, 2014.....	37
Tabel 10. Distribusi Pendapatan Menurut Klasifikasi Daerah dan Kriteria Bank Dunia di Provinsi Bali, 2014	38
Tabel 11. <i>Gini Ratio</i> Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2012—2014	42
Tabel 12. Distribusi Pendapatan Menurut Kabupaten/Kota dan Kriteria Bank Dunia di Provinsi Bali, 2011—2014.....	43

Tabel 13.	Rata-Rata Konsumsi per Kapita per Bulan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Pengeluaran di Provinsi Bali, 2014	51
Tabel 14.	Rata-Rata Konsumsi per Kapita per Bulan Penduduk Menurut Kelompok Pendapatan dan Jenis Pengeluaran di Kabupaten Jembrana, 2014	52
Tabel 15.	Rata-Rata Konsumsi per Kapita per Bulan Penduduk Menurut Kelompok Pendapatan dan Jenis Pengeluaran di Kabupaten Tabanan, 2014.....	53
Tabel 16.	Rata-Rata Konsumsi per Kapita per Bulan Penduduk Menurut Kelompok Pendapatan dan Jenis Pengeluaran di Kabupaten Badung, 2014	54
Tabel 17.	Rata-Rata Konsumsi per Kapita per Bulan Penduduk Menurut Kelompok Pendapatan dan Jenis Pengeluaran di Kabupaten Gianyar, 2014	55
Tabel 18.	Rata-Rata Konsumsi per Kapita per Bulan Penduduk Menurut Kelompok Pendapatan dan Jenis Pengeluaran di Kabupaten Klungkung, 2014	56
Tabel 19.	Rata-Rata Konsumsi per Kapita per Bulan Penduduk Menurut Kelompok Pendapatan dan Jenis Pengeluaran di Kabupaten Bangli, 2014	57
Tabel 20.	Rata-Rata Konsumsi per Kapita per Bulan Penduduk Menurut Kelompok Pendapatan dan Jenis Pengeluaran di Kabupaten Karangasem, 2014.....	58
Tabel 21.	Rata-Rata Konsumsi per Kapita per Bulan Penduduk Menurut Kelompok Pendapatan dan Jenis Pengeluaran di Kabupaten Buleleng, 2014.....	59
Tabel 22.	Rata-Rata Konsumsi per Kapita per Bulan Penduduk Menurut Kelompok Pendapatan dan Jenis Pengeluaran di Kota Denpasar, 2014	60
Tabel 23.	Rata-Rata Konsumsi per Kapita per Bulan Penduduk Menurut Sub Kelompok Makanan di Provinsi Bali, 2014	61
Tabel 24.	Rata-Rata Konsumsi per Kapita per Bulan Penduduk Menurut Sub Kelompok Non Makanan di Provinsi Bali, 2014.....	62

Tabel 25. Rata-rata Konsumsi Kalori dan Protein per Kapita Sehari Menurut Sub Kelompok Bahan Makanan di Provinsi Bali, 2012—2014.....	63
---	----

<http://bali.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
Gambar 1. Kurva Lorenz.....	11
Gambar 2. Rata-rata Pengeluaran per Kapita per Bulan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2014	17
Gambar 3. Persentase Rata-rata Pengeluaran per Kapita per Bulan Penduduk Menurut Kelompok Makanan dan Non Makanan di Provinsi Bali, 2014.....	23
Gambar 4. Proporsi Pengeluaran per Kapita per Bulan Penduduk Menurut Sub Kelompok Makanan di Provinsi Bali, 2014.	26
Gambar 5. Proporsi Pengeluaran per Kapita per Bulan Penduduk Menurut Sub Kelompok Non Makanan di Provinsi Bali, 2014.....	32
Gambar 6. Distribusi Pendapatan Menurut Klasifikasi Daerah di Provinsi Bali, 2014	40
Gambar 7. Distribusi Pendapatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2014	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Salah satu tujuan nasional Bangsa Indonesia yang secara jelas termaktub dalam Pembukaan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum. Selain itu, salah satu sila dari Pancasila sebagai dasar negara juga menyebutkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Penegasan tujuan dan dasar negara itu memberi arti bahwa tugas pemerintah Indonesia adalah menjamin kesejahteraan rakyatnya.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memajukan kesejahteraan rakyat adalah dengan melakukan pembangunan pada berbagai sektor, khususnya pembangunan pada sektor ekonomi. Pembangunan pada sektor ekonomi merupakan proses yang dapat menyebabkan pendapatan per kapita sebuah negara meningkat untuk periode jangka panjang, dengan syarat jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan mutlak tidak naik dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang. Suatu perekonomian dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang apabila pendapatan per kapita dalam jangka panjang cenderung meningkat. Hal ini tidak berarti bahwa pendapatan per kapita harus mengalami kenaikan secara terus-menerus. Dengan demikian, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan semua elemen yang terdapat dalam suatu negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Hal ini dilakukan karena kenaikan pendapatan per kapita mencerminkan perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan per kapita merupakan besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu wilayah. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian total pendapatan pada suatu wilayah dengan jumlah penduduk di wilayah tersebut. Dalam hal ini, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan pendekatan pengeluaran/konsumsi masyarakat dalam menghitung pendapatan per kapita. Hal ini didasarkan pada paradigma bahwa bila pendapatan mengalami kenaikan akan diikuti oleh kenaikan pengeluaran. Sebab, bukanlah hal yang mudah untuk mengumpulkan data mengenai jumlah pendapatan yang diterima oleh penduduk. Umumnya, penduduk masih enggan untuk memberikan informasi mengenai jumlah pendapatan yang diterima. Penduduk lebih terbuka memberikan informasi mengenai jumlah pengeluaran.

Data jumlah pengeluaran tersebut dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum dengan menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk. Makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan penduduk.

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Mengukur tingkat kesejahteraan penduduk hanya dari sisi tingkat pendapatan per kapita saja tidaklah cukup. Tingginya tingkat pendapatan

penduduk suatu daerah tidak secara langsung mencerminkan tingginya tingkat kesejahteraan penduduk di daerah tersebut. Pada kenyataannya, pendapatan antara individu yang satu dengan individu lainnya tidaklah selalu seragam. Bahkan, terkadang terdapat ketimpangan yang cukup mencolok antara penduduk yang kaya dengan yang miskin. Indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan ekonomi antar penduduk adalah dengan menghitung distribusi pendapatan. Dalam hal ini, BPS menghitung distribusi pendapatan berdasarkan pada data pengeluaran/konsumsi masyarakat yang dikumpulkan melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). BPS menggunakan tiga metode untuk mengetahui distribusi pendapatan penduduk, yaitu Koefisien Gini Ratio, Kriteria Bank Dunia, dan Kurva Lorenz. Ketiga indikator tersebut diharapkan dapat dijadikan dasar perencanaan bagi pembangunan di masa mendatang sehingga secara nyata mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk Provinsi Bali pada khususnya dan penduduk Indonesia pada umumnya. Di samping itu, ketiga indikator tersebut dapat menjadi alat kontrol dan evaluasi terhadap proses pembangunan yang telah berjalan selama ini.

1.2. TUJUAN PENULISAN

Pada dasarnya, publikasi ini disusun dengan tujuan untuk memberikan data dan informasi mengenai indikator tingkat kesejahteraan penduduk Provinsi Bali tahun 2014 kepada Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan para pengguna data lainnya. Secara khusus, tujuan publikasi ini disusun, antara lain

- a. Untuk mengetahui pola konsumsi penduduk Provinsi Bali tahun 2014,
- b. Untuk mengetahui distribusi pendapatan penduduk Provinsi Bali tahun 2014, dan
- c. Untuk mengetahui ketimpangan pendapatan penduduk Provinsi Bali.

1.3. SUMBER DATA

Sumber data utama Publikasi Pola Konsumsi dan Distribusi Pendapatan Provinsi Bali 2014 diperoleh dari hasil pendataan Susenas 2014. Seperti diketahui, Susenas merupakan survei yang mengumpulkan data tentang kesejahteraan rakyat melalui pendekatan rumah tangga yang tersebar di daerah perkotaan dan perdesaan. Semua data yang dicantumkan dalam publikasi ini merupakan data sementara. Data tersebut akan diperbaharui jika angka final hasil Susenas 2014 sudah tersedia.

<http://bali.bps.go.id>

BAB II

METODOLOGI

Publikasi ini disusun berdasarkan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) secara triwulanan pada tahun 2014. Seperti halnya publikasi tahun sebelumnya, metodologi, serta konsep dan definisi Susenas tetap dicantumkan untuk memberikan arah dan panduan dalam pemanfaatan data yang disajikan.

2.1. RUANG LINGKUP

Pelaksanaan Susenas 2014 mencakup 300.000 rumah tangga sampel yang tersebar di seluruh provinsi dan 497 kabupaten/kota di Indonesia, yang mana setiap triwulan akan didistribusikan sebanyak 7.500 blok sensus atau 75.000 rumah tangga. Data hasil pencacahan setiap triwulan dapat disajikan baik untuk tingkat nasional maupun provinsi, sedangkan dari data kumulatif hasil pelaksanaan pencacahan selama empat triwulan dapat disajikan sampai dengan tingkat kabupaten/kota. Untuk Provinsi Bali, jumlah sampelnya sebesar 5.760 rumah tangga, tersebar dalam 576 blok sensus di wilayah perkotaan dan perdesaan.

Data yang dikumpulkan dalam Susenas meliputi keterangan umum anggota rumah tangga; keterangan anggota rumah tangga yang melakukan perjalanan; keterangan akte kelahiran; keterangan anggota rumah tangga yang mengikuti pendidikan pra sekolah; keterangan tempat lahir, tempat tinggal 5 tahun yang lalu dan keberadaan ibu kandung di dalam rumah tangga; keterangan tentang kesehatan; keterangan pendidikan anggota rumah tangga 5 tahun ke atas dan akses terhadap internet; keterangan kegiatan ketenagakerjaan anggota rumah tangga 10 tahun ke atas; keterangan fertilitas untuk wanita pernah kawin dan cara pencegahan

kehamilan untuk wanita berstatus kawin; keterangan perumahan; keterangan perlindungan sosial; keterangan teknologi komunikasi dan informasi; keterangan tentang kuantitas dan nilai konsumsi makanan, minuman, dan tembakau; serta keterangan tentang pengeluaran rumah tangga untuk barang-barang bukan makanan.

2.2. KERANGKA SAMPEL

Kerangka sampel yang digunakan terdiri dari tiga jenis, yaitu

- a. Kerangka sampel untuk pemilihan tahap pertama adalah daftar wilayah pencacahan (wilcah) SP2010 yang disertai dengan informasi banyaknya rumah tangga hasil listing SP2010 (Daftar RBL1), muatan blok sensus dominan (pemukiman biasa, pemukiman mewah, pemukiman kumuh), informasi daerah sulit/tidak sulit, dan klasifikasi desa/kelurahan (*rural/urban*).
- b. Kerangka sampel pemilihan tahap kedua adalah daftar blok sensus pada setiap wilcah terpilih.
- c. Kerangka sampel pemilihan tahap ketiga adalah daftar rumah tangga biasa tidak termasuk *institutional household* (panti asuhan, barak polisi/militer, penjara, dsb.) dalam setiap blok sensus sampel hasil pencacahan lenkap SP2010 (SP2010-C1) yang telah dimutakhirkan pada setiap menjelang pelaksanaan survei.

2.3. DESAIN SAMPEL

Metode sampling yang digunakan adalah penarikan sampel tiga tahap berstrata. Tahapan dari metode ini diuraikan sebagai berikut.

- a. Tahap pertama, memilih n_h wilcah dari N_h secara *pps* (*Probability Proportional to Size*) dengan *size* banyaknya rumah tangga SP2010 (M_h). Kemudian wilcah tersebut dialokasikan secara acak ke dalam empat triwulan. Keseluruhan harus diambil sebanyak $n_h = 30.000$ wilcah

sehingga masing-masing triwulan akan ada sebanyak 7.500 wilcah. Dari 7.500 wilcah Susenas Triwulan I, dipilih sebanyak 5.999 wilcah secara sistematis untuk Sakernas 2012 Triwulan I dan akan digunakan lagi untuk Triwulan II, III, dan IV.

- b. Tahap kedua, memilih blok sensus pada setiap wilcah terpilih Susenas Triwulan I, II, III, dan IV.
- c. Tahap ketiga, dari setiap blok sensus terpilih untuk Susenas dipilih sejumlah rumah tangga biasa ($m = 10$) secara sistematis berdasarkan hasil pemutakhiran listing rumah tangga SP2010-C1 dengan menggunakan Daftar VSEN14-P. Daftar nama kepala rumah tangga disusun dari Ekstrak SP2010-C1 untuk variabel nama KRT, alamat, dan tingkat pendidikan KRT, kemudian dilakukan pemutakhiran lapangan. Variabel tingkat pendidikan KRT digunakan sebagai *implicit stratification* dalam pemilihan sampel *Ultimate Sampling Unit*.

2.4. METODE PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data dari rumah tangga terpilih dilakukan melalui wawancara tatap muka antara pencacah dengan responden. Untuk pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner Susenas 2014 yang ditujukan kepada individu perlu diusahakan agar individu yang bersangkutan yang diwawancarai. Keterangan dalam rumah tangga dapat dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala rumah tangga, suami/istri kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga lain yang mengetahui karakteristik yang ditanyakan.

2.5. PENGOLAHAN

Pengolahan dokumen terdiri dari kegiatan *receiving-batching*, *editing-coding*, *entry*, kompilasi data dan tabulasi. Untuk kegiatan *receiving-batching*, *editing-coding*, dan *entry* data dilakukan di BPS Kabupaten/Kota,

sedangkan untuk kompilasi data dan tabulasi dilakukan di BPS RI dan BPS Provinsi Bali.

2.6. METODE ANALISIS

Ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk mengukur distribusi pendapatan. Dalam publikasi ini, distribusi pendapatan diukur dari nilai konsumsi rumah tangga penduduk, sedangkan untuk mengukur pemerataan pendapatan digunakan metode Gini Ratio, Ukuran Bank Dunia, dan Kurva Lorenz. Ketiga metode ini dipakai mengingat bahwa ketiganya banyak digunakan di berbagai negara maupun daerah lain di Indonesia, sehingga hasil penghitungan ini bisa dibandingkan dengan penghitungan di daerah lain dan atau dengan negara lain.

2.6.1. GINI RATIO

Salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengetahui kesenjangan distribusi pendapatan adalah Gini Ratio. Nilai gini ratio berkisar antara nol dan satu. Bila gini ratio sama dengan nol berarti distribusi pendapatan sangat merata karena setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama. Namun, jika gini ratio sama dengan satu berarti terjadi ketimpangan distribusi pendapatan yang sempurna karena seluruh pendapatan hanya dinikmati oleh satu orang saja. Singkatnya, semakin tinggi nilai gini ratio, maka semakin timpang distribusi pendapatan suatu daerah. Sebaliknya, semakin rendah nilai gini ratio berarti semakin merata distribusi pendapatannya.

Harry T. Oshima memberikan batasan mengenai Koefisien Gini, sebagai berikut

- a. Bila koefisien Gini terletak antara 0,50 dan 1 maka ketimpangan pembagian pendapatan dikatakan tinggi.

- b. Bila koefisien Gini terletak antara 0,35 dan 0,50 maka ketimpangan pembagian pendapatan dikatakan sedang.
- c. Bila koefisien Gini terletak dibawah 0,35 maka ketimpangan pembagian pendapatan dikatakan rendah.

Rumus untuk menghitung gini ratio adalah

$$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i (Q_i + Q_{i-1})$$

dengan

G : Gini ratio,

P_i : Persentase rumah tangga/penduduk pada kelompok pendapatan ke-(i),

Q_i : Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelompok ke-(i),

Q_{i-1} : Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelompok ke-(i - 1), dan

K : Banyaknya kelompok pendapatan.

2.6.2. Kriteria Bank Dunia

Bank Dunia membagi penduduk menurut kelompok pendapatan menjadi tiga kelompok pendapatan, yaitu kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah, kelompok 40 persen penduduk berpendapatan menengah, dan kelompok 20 persen penduduk berpendapatan tinggi.

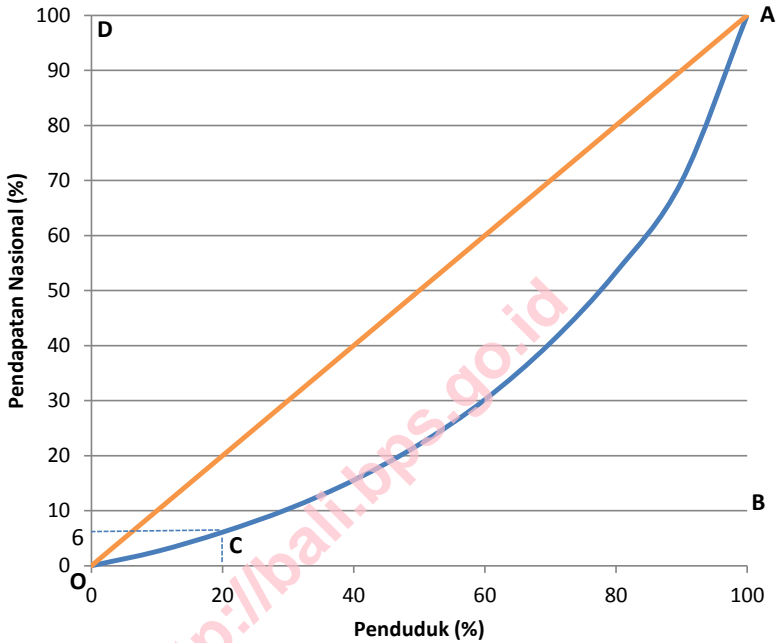
Dalam melihat pemerataan pendapatan, Bank dunia memfokuskan perhatiannya pada perkembangan pendapatan kelompok 40 persen penduduk berpendapatan terendah saja. Pemerataan diukur berdasarkan persentase pendapatan yang diterima kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah.

- a. Apabila kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah menerima kurang dari 12 persen jumlah pendapatan, maka dikatakan pemerataan rendah atau ketimpangan distribusi pendapatan tinggi.
- b. Apabila kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah menerima 12 hingga 17 persen jumlah pendapatan, maka dikatakan pemerataan sedang atau ketimpangan distribusi pendapatan sedang.
- c. Apabila kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah menerima lebih dari 17 persen jumlah pendapatan, maka dikatakan pemerataan tinggi atau ketimpangan distribusi pendapatan rendah.

2.6.3. Kurva Lorenz

Ukuran Koefisien Gini biasanya divisualisasikan dalam bentuk kurva Lorenz. Pada kurva Lorenz diperlihatkan hubungan antara penduduk sebagai penerima pendapatan dan jumlah pendapatan yang diterima. Kurva Lorenz digambarkan pada satu segi empat sama sisi, dimana sumbu horizontal menunjukkan persentase jumlah penduduk sedangkan sumbu vertikal menunjukkan persentase jumlah pendapatan yang diterima.

Gambar 1.
Kurva Lorenz



dengan

OD : Persentase kumulatif pendapatan,

OB : Persentase kumulatif penduduk,

OA : Diagonal Gini

C : menunjukkan bahwa 20 persen penduduk menikmati sekitar 6 persen pendapatan. Idealnya adalah 20 persen. Singkatnya, makin jauh garis OCA dari diagonal OA makin senjang tingkat pendapatan penduduk.

BAB III

KONSEP DAN DEFINISI

Untuk menyamakan persepsi mengenai rincian-rincian dalam Publikasi ini, maka dilakukan pembatasan melalui konsep dan definisi sebagai berikut:

- **Blok Sensus (BS)** adalah bagian dari suatu wilayah desa/kelurahan yang membagi habis suatu desa/kelurahan tersebut dan merupakan daerah kerja dari seorang pencacah. Blok sensus mempunyai batas-batas yang jelas dan mudah dikenali, baik batas alam maupun buatan yang diperkirakan tidak akan berubah dalam jangka waktu sepuluh tahun. Pada umumnya BS mencakup sekitar 80—120 rumah tangga atau bangunan fisik bukan tempat tinggal atau dapat juga merupakan gabungan dari keduanya.
- **Klasifikasi daerah** adalah karakteristik yang membedakan lokasi daerah menurut indikator komposit yang telah ditetapkan. Klasifikasi daerah dibedakan menjadi dua, yaitu daerah perkotaan dan perdesaan.
- **Pengeluaran/konsumsi rumah tangga sebulan** adalah rata-rata biaya yang dikeluarkan rumah tangga sebulan untuk konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun non makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain.
- **Konsumsi makanan** adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan makanan termasuk makanan jadi, rokok, dan tembakau. Pengeluaran untuk konsumsi makanan dihitung selama seminggu yang lalu.
- **Konsumsi non makanan** adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk biaya perumahan, pendidikan, kesehatan, aneka barang dan jasa,

pakaian, dan barang tahan lama tanpa memperhatikan asal barang. Pengeluaran untuk konsumsi bukan makanan dihitung selama sebulan yang lalu.

- **Distribusi pendapatan** adalah banyaknya pendapatan yang diterima oleh masing-masing rumah tangga/penduduk suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Dalam penelitian ini distribusi pendapatan diukur dari nilai konsumsi rumah tangga/penduduk.
- **Pola konsumsi** adalah kecenderungan rumah tangga/penduduk membelanjakan pendapatannya dalam upaya memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga/penduduk tersebut, baik konsumsi makanan maupun bukan makanan.
- **Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan** adalah seluruh biaya pengeluaran yang dikeluarkan oleh rumah tangga sebulan oleh semua anggota rumah tangga di bagi jumlah anggota rumah tangga.
- **Gini Rasio** adalah rasio dari suatu ukuran pemerataan atau ketimpangan distribusi pendapatan penduduk suatu wilayah.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. PENGELUARAN PER KAPITA PENDUDUK

Besarnya pendapatan yang diterima rumah tangga dapat menggambarkan kesejahteraan suatu masyarakat. Namun, data pendapatan yang akurat sulit diperoleh sehingga dalam kegiatan Susenas data pendapatan didekati melalui data pengeluaran rumah tangga.

Pengeluaran konsumsi yang dilakukan rumah tangga bertujuan untuk mempertahankan taraf hidup. Pada tingkat pendapatan yang rendah, pengeluaran konsumsi umumnya dibelanjakan untuk kebutuhan-kebutuhan pokok guna memenuhi kebutuhan jasmani. Keanekaragamannya pun tergantung pada tingkat pendapatan rumah tangga. Pada tingkat pendapatan yang lebih tinggi, jumlah dan jenis kebutuhannya pun semakin kompleks. Tingkat pendapatan yang berbeda-beda ini mengakibatkan perbedaan taraf dan pola pengeluaran konsumsi.

Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk Provinsi Bali pada tahun 2012—2014 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2012, rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk Provinsi Bali sebesar Rp.911.724,00. Meningkat Rp.82.346,00 atau tumbuh sekitar 9,03 persen di tahun 2013 menjadi Rp.994.070,00. Sementara itu, rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk Provinsi Bali di tahun 2014 sebesar Rp.1.097.749,00 meningkat sebesar Rp.103.679,00 atau tumbuh sebesar 10,43 persen dibanding tahun sebelumnya. Kondisi ini menggambarkan bahwa jika harga-harga tidak banyak berubah, kenaikan rata-rata pengeluaran per kapita tersebut jelas menunjukkan adanya peningkatan daya beli penduduk. Peningkatan kemampuan daya beli

penduduk tersebut memberi arti bahwa penduduk memiliki lebih banyak keleluasaan dalam menentukan pilihan untuk membelanjakan pendapatannya dari tahun ke tahun menuju pemenuhan kebutuhan ke arah yang lebih baik.

Tabel 1.
Rata-rata Pengeluaran per Kapita per Bulan Penduduk Menurut Klasifikasi Daerah di Provinsi Bali, 2012—2014

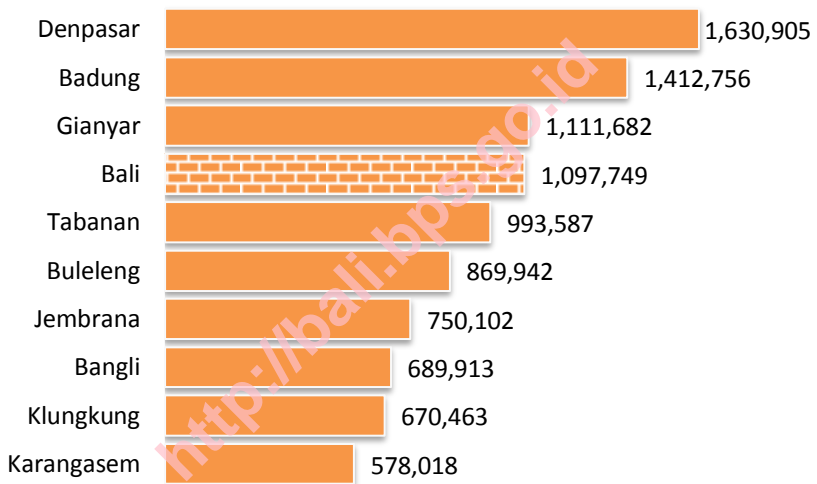
Klasifikasi Daerah	2012	Pertumbuhan (%)	2013	Pertumbuhan (%)	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkotaan	1.073.654	8,72	1.167.282	11,56	1.302.196
Perdesaan	664.265	9,71	728.744	7,35	782.336
Bali	911.724	9,03	994.070	10,43	1.097.749

Pada Tabel 1 diperlihatkan mengenai rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk Provinsi Bali menurut daerah tempat tinggal, perdesaan dan perkotaan. Selama periode 2012—2014, rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk di perkotaan lebih besar dibandingkan di perdesaan. Kondisi ini terkait dengan lebih kompleksnya pengeluaran penduduk di perkotaan dibandingkan penduduk di perdesaan. Hasil Susenas 2014 menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk yang tinggal di perkotaan mencapai Rp.1.302.196,00, sedangkan untuk daerah perdesaan mencapai Rp.782.336,00.

Jika dilihat dari pertumbuhannya, ternyata rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk perdesaan meningkat lebih tinggi dari perkotaan pada periode 2012—2013. Di perdesaan terjadi pertumbuhan sebesar 9,71 persen, sedangkan di perkotaan meningkat sebesar 8,72 persen atau lebih rendah 1,01 poin. Akan tetapi, pada periode 2013—2014 rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk di perdesaan tumbuh sebesar 7,35 persen, sedangkan di perkotaan tumbuh sebesar 11,56 persen.

Tinggi rendahnya rata-rata pengeluaran per kapita per bulan selain menjadi tolok ukur tingkat kemakmuran penduduk juga dapat digunakan untuk membandingkan tingkat kesejahteraan penduduk antar daerah, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.

Gambar 2.
Rata-rata Pengeluaran per Kapita per Bulan Penduduk
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2014



Secara umum, Kota Denpasar memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan tertinggi di antara kabupaten/kota lain di Bali, yaitu mencapai Rp.1.630.905,00. Selain Kota Denpasar, rata-rata pengeluaran per kapita per bulan Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar lebih tinggi dari rata-rata pengeluaran per kapita per bulan Provinsi Bali, yaitu sebesar Rp.1.412.756,00 untuk Kabupaten Badung dan sebesar Rp.1.111.682,00 untuk Kabupaten Gianyar. Tingginya nilai rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di tiga wilayah tersebut menunjukkan bahwa kemakmuran serta kesejahteraan penduduknya lebih baik dibanding kabupaten/kota lain di Provinsi Bali pada umumnya. Di sisi lain, Kabupaten Karangasem merupakan

kabupaten/kota dengan nilai rata-rata pengeluaran per kapita per bulan terendah di Provinsi Bali, yaitu hanya mencapai Rp.578.018,00.

Perbandingan mengenai rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk Provinsi Bali juga dapat dikaji berdasarkan persentase penduduk menurut kelompok pengeluaran, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2. Berdasarkan tabel tersebut ternyata terjadi pergeseran persentase penduduk ke kelompok rata-rata pengeluaran per kapita per bulan yang lebih tinggi, seiring dengan meningkatnya rata-rata pengeluaran per kapita penduduk.

Tabel 2.
Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Rata-rata Pengeluaran per Kapita per Bulan di Provinsi Bali, 2014

Kabupaten /Kota	Rata-rata Pengeluaran per Kapita per Bulan (Rupiah/Bulan)					
	100.000	150.000	200.000	300.000	400.000	>=
	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.	500.00
	149.999	199.999	299.999	399.999	499.999	0
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jembrana	0,00	0,40	11,54	18,86	16,72	52,48
Tabanan	0,00	0,05	3,99	11,15	13,77	71,04
Badung	0,00	0,00	0,15	2,40	8,21	89,24
Gianyar	0,00	0,00	0,62	7,59	14,38	77,42
Klungkung	0,00	2,45	10,26	17,18	23,70	46,40
Bangli	0,00	0,57	5,02	23,33	17,05	54,04
Karangasem	0,13	1,95	14,30	29,75	15,11	38,75
Buleleng	0,00	0,14	5,97	17,34	14,60	61,95
Denpasar	0,00	0,00	0,62	3,26	7,53	88,60
Bali 2014	0,01	0,38	4,45	11,97	12,75	70,43
2013	0,01	0,48	5,40	13,57	12,53	68,01

Secara umum terjadi penurunan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di hampir semua kelompok pengeluaran pada periode 2013—

2014, kecuali pada kelompok pengeluaran Rp.400.000,00 s.d. Rp.499.999 dan di atas Rp.500.000,00. Terdapat sekitar 83,19 persen penduduk yang rata-rata pengeluaran konsumsinya di atas Rp.400.000,00 atau meningkat 2,65 poin dibanding tahun sebelumnya. Penurunan tertinggi adalah pada kelompok rata-rata pengeluaran Rp.300.000,00 s.d. Rp.399.999,00 sebanyak 1,60 poin, yaitu dari 13,57 persen di tahun 2013 menjadi 11,97 persen di tahun berikutnya. Perubahan atau pergeseran persentase kelompok rata-rata pengeluaran penduduk dari kelompok rendah ke kelompok tinggi ini menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan seiring dengan meningkatnya kemampuan daya beli penduduk. Bisa dikatakan bahwa kondisi ini dapat menjadi indikator awal dari keberhasilan program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah.

Variasi persentase penduduk dengan kelompok pengeluaran juga terjadi di hampir seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali. Dari Tabel 2 terlihat bahwa kelompok rata-rata pengeluaran di atas Rp.500.000,00 mendominasi besaran persentase penduduk di semua kabupaten/kota di Bali. Kabupaten Badung menduduki urutan pertama, sebesar 89,24 persen penduduknya telah membelanjakan pendapatannya di atas Rp.500.000,00, diikuti oleh Kota Denpasar sebesar 88,60 persen. Sama halnya dengan kedua kabupaten/kota sebelumnya, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Tabanan juga memiliki persentase kelompok rata-rata pengeluaran di atas Rp.500.000,00 yang lebih tinggi dari rata-rata pengeluaran di Provinsi Bali. Hal ini menunjukkan bahwa keempat wilayah tersebut memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik dibanding wilayah lain di Bali karena wilayah tersebut merupakan sentra pertumbuhan ekonomi di Pulau Bali.

Dari data yang disajikan pada Tabel 2, terlihat pula bahwa di Kabupaten Karangasem masih ada penduduk yang rata-rata pengeluarannya berada pada kelompok terendah (Rp.100.000,00 s.d. Rp.149.999,00), yaitu sebesar 0,13 persen. Selain itu, Kabupaten Karangasem juga merupakan

kabupaten dengan persentase terendah (38,75 persen) kelompok rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di atas Rp.500.000,00 di Bali.

4.2. POLA KONSUMSI PENDUDUK

Pengaruh pendapatan terhadap konsumsi mempunyai hubungan yang sangat erat. Penghasilan seseorang merupakan faktor utama yang menentukan pola konsumsinya. Semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka patut diduga akan semakin baik pula pola konsumsinya. Hal ini dimungkinkan karena meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat. Yang dimaksud dengan pola konsumsi adalah kecenderungan rumah tangga atau penduduk membelanjakan pendapatannya dalam upaya memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga/penduduk tersebut, baik konsumsi makanan maupun non makanan.

Pola pengeluaran konsumsi penduduk dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan. Semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran, maka semakin baik tingkat perekonomian penduduk. Selain itu, dari data pengeluaran (sebagai proksi data pendapatan) dapat pula dihitung tingkat ketimpangan pendapatan penduduk suatu wilayah.

Pengeluaran yang dihitung dalam Susenas dibagi menjadi dua jenis, yaitu pengeluaran untuk makanan dan untuk non makanan. Pengeluaran untuk konsumsi makanan dihitung selama seminggu terakhir, sedangkan konsumsi non makanan dihitung selama sebulan terakhir. Pengeluaran-pengeluaran tersebut selanjutnya dikonversi menjadi pengeluaran rata-rata sebulan.

Tingkat pemenuhan kebutuhan dua jenis pengeluaran tersebut pada dasarnya berbeda. Dalam kondisi pendapatan terbatas, kebutuhan makanan lebih didahulukan sehingga pada kelompok masyarakat

berpendapatan rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan. Seiring dengan peningkatan pendapatan, maka lambat laun akan terjadi pergeseran pola pengeluaran, yaitu penurunan alokasi pendapatan yang dibelanjakan untuk makanan dan peningkatan alokasi pendapatan yang dibelanjakan untuk non makanan.

Pergeseran komposisi dan pola pengeluaran tersebut terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan secara umum rendah, sedangkan elastisitas permintaan terhadap kebutuhan non makanan relatif lebih tinggi. Artinya, perubahan harga yang terjadi pada kelompok makanan, tidak akan terlalu mempengaruhi tingkat permintaan penduduk terhadap makanan. Berapapun harga makanan, penduduk senantiasa berusaha untuk membelinya. Berbeda halnya jika perubahan harga terjadi pada kelompok non makanan.

Berdasarkan hasil olah data Susenas 2014, pengeluaran rata-rata per kapita per bulan penduduk di Provinsi Bali sebesar Rp.1.097.749,00. Sebesar Rp.458.723,00 atau sebesar 41,79 persen dari total pengeluaran digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan dan sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan non makanan.

Terlihat bahwa selama periode tahun 2012 hingga 2014 telah terjadi fluktuasi persentase pola konsumsi penduduk Bali. Secara umum persentase pengeluaran untuk konsumsi makanan mengalami peningkatan dari 40,14 persen pada tahun 2012 menjadi 42,47 persen pada tahun 2013, dan menurun sebesar 0,68 poin pada tahun 2014. Hal sebaliknya terjadi pada pengeluaran untuk konsumsi non makanan. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi penduduk Bali selama tiga tahun terakhir masih tergolong belum stabil mengingat persentase pengeluaran rata-rata untuk masing-masing jenis pengeluaran masih menunjukkan fluktuasi.

Jika dirinci lebih dalam, fluktuasi persentase pola konsumsi masyarakat Bali selama tiga tahun terakhir juga terjadi di daerah perkotaan dan perdesaan. Di daerah perkotaan tercatat bahwa pada tahun 2012 hingga tahun 2013 pola konsumsi makanan mengalami peningkatan persentase, dari 37,01 persen (Rp.397.319,00) menjadi 39,76 persen (Rp.464.062,00) dan menurun menjadi 39,36 persen (Rp.512.603,00) pada tahun 2014. Hal ini bertolak belakang dengan fluktuasi persentase konsumsi non makanannya.

Tabel 3.
Pengeluaran Rata-rata per Kapita per Bulan
Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Pengeluaran di Provinsi Bali,
2012—2014

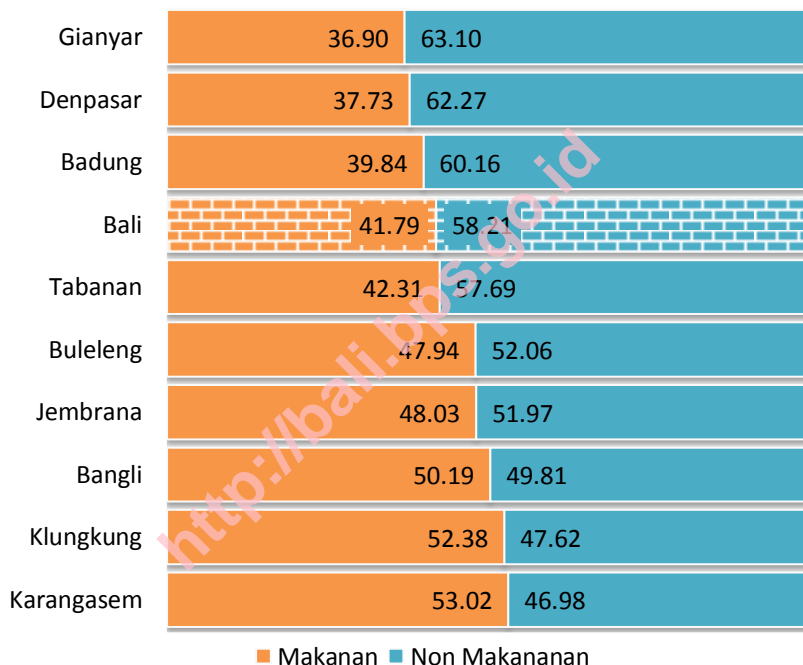
Daerah Tempat Tinggal	Jenis Pengeluaran						
	Makanan			Non Makanan			
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
Perkotaan	(Rp.)	397.319	464.062	512.603	676.334	703.221	789.593
	(%)	37,01	39,76	39,36	62,99	60,24	60,64
Perdesaan	(Rp.)	317.976	358.051	375.599	346.289	370.693	406.737
	(%)	47,37	49,13	48,01	52,13	50,87	51,99
Bali	(Rp.)	365.936	422.190	458.723	545.788	571.880	639.026
	(%)	40,14	42,47	41,79	59,86	57,53	58,21

Kondisi yang sama pun terjadi di daerah perdesaan, yaitu terjadi fluktuasi persentase pola konsumsi masyarakat selama tiga tahun terakhir, meskipun jika dilihat dari besaran absolutnya menunjukkan angka yang terus meningkat. Secara umum, jika dilihat dari proporsinya maka tingkat kesejahteraan penduduk daerah perkotaan lebih baik jika dibandingkan dengan perdesaan.

Bila dilihat menurut kabupaten/kota, terdapat variasi distribusi pengeluaran makanan dan non makanan yang cukup tinggi. Dari Gambar 3 berikut dapat dilihat bahwa secara regional, belum semua kabupaten/kota di

Provinsi Bali memiliki pola konsumsi penduduk yang telah terkonsentrasi pada kelompok non makanan.

Gambar 3.
 Persentase Rata-rata Pengeluaran per Kapita per Bulan Penduduk Menurut Kelompok Makanan dan Non Makanan di Provinsi Bali, 2014



Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Badung merupakan kabupaten/kota yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi makanan di bawah rata-rata pengeluaran konsumsi makanan Provinsi Bali yang mencapai 41,79 persen. Tidak mengherankan jika ketiga wilayah ini memiliki persentase pengeluaran non makanan lebih besar dari wilayah lain, sebab ketiga wilayah tersebut merupakan penggerak kegiatan ekonomi di Bali, terutama Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Dengan kata lain,

ketiga wilayah ini memiliki tingkat kesejahteraan penduduk yang lebih baik dari wilayah lainnya.

Pergeseran pola konsumsi penduduk akan jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, dimana kenaikan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan non makanan ataupun untuk investasi dan ditabung. Menurut Hukum Engel (Ernest Engel, 1857), "Bila selera tidak berubah maka persentase pengeluaran untuk makanan akan menurun seiring dengan meningkatnya pendapatan". Dengan ukuran yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, berdasarkan rata-rata pendapatannya, penduduk di suatu daerah dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah, kelompok 40 persen penduduk berpendapatan menengah, dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Mengacu pada Hukum Engel, berarti pengeluaran untuk makanan pada kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah akan lebih besar dibandingkan pengeluaran untuk non makanan, dan berlaku sebaliknya untuk kelompok pendapatan yang lebih tinggi.

Proporsi pengeluaran makanan dan non makanan penduduk Provinsi Bali tahun 2014 berdasarkan kelompok pengeluarannya dapat dilihat pada Tabel 4. Pada tabel terlihat bahwa berdasarkan kelompok pengeluaran penduduk persentase rata-rata pengeluaran untuk makanan mengalami penurunan, sedangkan untuk non makanan mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya pendapatan penduduk. Pada kelompok pengeluaran 40% penduduk berpengeluaran rendah, lebih dari 50 persen pendapatannya digunakan untuk konsumsi makanan. Persentase ini kemudian menurun di kelompok 40% penduduk berpengeluaran menengah. Kondisi mendekati titik jenuh terjadi pada kelompok 20% penduduk berpengeluaran tinggi, sekitar 68,47 persen dari pendapatannya digunakan untuk konsumsi non makanan atau hanya 31,53 persen pengeluarannya

digunakan untuk konsumsi makanan. Dengan kata lain, persentase pengeluaran untuk konsumsi makanan lebih rendah pada kelompok penduduk yang berpengeluaran tinggi.

Tabel 4.
Rata-rata Konsumsi per Kapita per Bulan Penduduk
Menurut Kelompok Pengeluaran Penduduk dan Jenis Pengeluaran
di Provinsi Bali, 2014

Kelompok Pengeluaran Penduduk	Makanan		Non Makanan		Total	
	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
40 % penduduk berpengeluaran rendah	257.874	60,66	167.254	39,34	425.128	
40 % penduduk berpengeluaran menengah	473.952	47,26	528.860	52,74	1.002.812	
20 % penduduk berpengeluaran tinggi	829.725	31,53	1.802.145	68,47	2.631.870	
Bali	2014	458.723	41,79	639.026	58,21	1.097.749
	2013	422.190	42,47	571.880	57,53	994.070

4.2.1. KONSUMSI MAKANAN

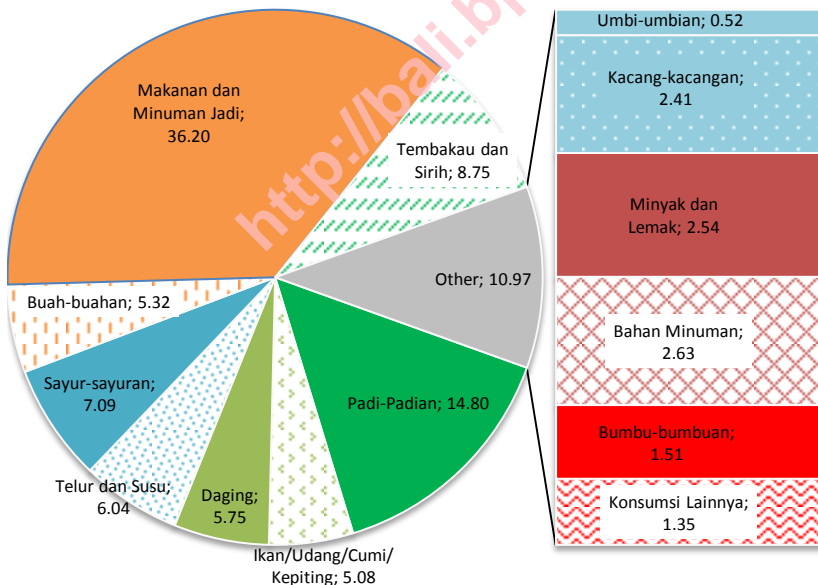
Makanan memegang peranan penting bagi kelangsungan hidup manusia sehingga manusia akan melakukan berbagai upaya agar dapat mengkonsumsi makanan yang memadai. Konsumsi makanan akan bertambah seiring dengan peningkatan pendapatan. Namun, sampai pada titik jenuh tertentu, penambahan pendapatan akan digunakan untuk konsumsi non makanan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya elastisitas permintaan terhadap makanan.

Pengeluaran untuk kelompok makanan meliputi pengeluaran untuk konsumsi padi-padian, umbi-umbian, ikan/udang/cumi/kerang, daging, telur dan susu, sayur-sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan

lemak, bahan minuman, bumbu-bumbuan, konsumsi lainnya, makan dan minuman jadi, serta tembakau dan sirih.

Makanan yang dikonsumsi tersebut adalah makanan yang betul-betul dikonsumsi, baik berasal dari produksi sendiri, pembelian, maupun pemberian. Pengeluaran untuk makanan dihitung menggunakan *consumption approach*, artinya yang dihitung sebagai pengeluaran adalah yang sudah benar-benar dikonsumsi selama masa referensi. Dalam hal ini, referensi waktu yang BPS gunakan adalah jangka waktu seminggu yang lalu.

Gambar 4.
Proporsi Pengeluaran per Kapita per Bulan Penduduk Menurut Sub Kelompok Makanan di Provinsi Bali, 2014



Pengeluaran untuk makanan diklasifikasikan menjadi empat belas kelompok, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4. Terlihat bahwa pengeluaran untuk konsumsi makanan dan minuman jadi menempati

proporsi tertinggi, sebesar 36,20 persen. Meskipun persentase konsumsi padi-padian dan umbi-umbian lebih rendah dari makanan dan minuman jadi, namun konsumsi komoditi jenis ini cenderung masih tinggi dan ke depan kebutuhan terhadap beras masih meningkat.

Untuk kelompok sumber protein (ikan/udang/cumi/kepiting, daging, telur dan susu) dikonsumsi penduduk sebesar 16,87 persen, sedangkan kelompok sayur-sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan memiliki proporsi sebesar 14,82 persen.

Tabel 5.
Proporsi Pengeluaran per Kapita per Bulan Penduduk Menurut
Sub Kelompok Makanan dan Klasifikasi Daerah di Provinsi Bali, 2014

Jenis Komoditi	Perkotaan (%)	Perdesaan (%)
(1)	(2)	(3)
Padi-Padian	12,15	20,40
Umbi-umbian	0,45	0,69
Ikan/udang/Cumi/Kepiting	4,89	5,48
Daging	5,80	5,66
Telur dan Susu	6,58	4,90
Sayur-sayuran	6,38	8,59
Kacang-kacangan	2,21	2,84
Buah-buahan	5,05	5,88
Minyak dan Lemak	2,17	3,31
Bahan Minuman	2,25	3,43
Bumbu-bumbuan	1,41	1,74
Konsumsi Lainnya	1,29	1,48
Makanan dan Minuman Jadi	41,10	25,88
Tembakau dan Sirih	8,28	9,73
Total	100,00	100,00

Jenis kelompok makanan yang dikonsumsi penduduk dengan persentase kurang dari 2 persen berturut-turut adalah bumbu-bumbuan (1,51 persen), dan konsumsi lainnya (1,35 persen).

Tabel 5 di bawah menggambarkan proporsi pengeluaran per kapita per bulan menurut sub kelompok makanan dan klasifikasi daerah, baik perkotaan maupun perdesaan. Perbedaan gaya hidup antara penduduk di daerah perkotaan dan perdesaan mengakibatkan perbedaan pola konsumsi makanan yang cukup signifikan di antara penduduk pada kedua daerah tersebut.

Proporsi terbesar pada konsumsi makanan dan minuman jadi di daerah perkotaan mencapai 41,10 persen, sedangkan di daerah perdesaan hanya mencapai 25,88 persen. Kepraktisan dan kemudahan mengonsumsi kelompok tersebut di daerah perkotaan lebih menjadi pertimbangan utama penduduk perkotaan membelanjakan pengeluarannya, disamping karena kesibukan dan terbatasnya waktu penduduk perkotaan. Kelompok pengeluaran tertinggi berikutnya untuk daerah perkotaan adalah kelompok padi-padian, yaitu sebesar 12,15 persen, dan 8,28 persen untuk kelompok tembakau dan sirih.

Pada tabel 5 juga dapat dilihat bahwa persentase kelompok makanan dan minuman jadi di daerah perdesaan lebih besar daripada kelompok padi-padian. Hal ini mengindikasikan bahwa di daerah perdesaan juga terdapat pergeseran proporsi pengeluaran dari kelompok padi-padian menjadi konsumsi makanan dan minuman jadi yang mencapai 25,88 persen, melebihi konsumsi kelompok padi-padian, yaitu sebesar 20,40 persen. Pengaruh makin maraknya produk-produk instan di masyarakat juga menjadi salah satu penyebab pergeseran pola konsumsi ini. Kecenderungan untuk bersikap lebih efisien dan praktis itulah yang mempengaruhi

masyarakat umum untuk beralih mengonsumsi jenis makanan dan minuman jadi.

Tabel 6.
 Persentase Rata-rata Pengeluaran per Kapita per Bulan Penduduk
 Menurut Sub Kelompok Makanan dan Kelompok Rata-rata Pengeluaran
 di Provinsi Bali, 2014

Jenis Komoditi	Rata-rata Pengeluaran per Kapita per Bulan (Rupiah/Bulan)						Total
	100.000 s.d. 149.999	150.000 s.d. 199.999	200.000 s.d. 299.999	300.000 s.d. 399.999	400.000 s.d. 499.999	>= 500.000	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Padi-Padian	56,21	40,83	33,85	26,87	20,72	13,05	14,80
Umbi-umbian	0,00	3,79	1,19	0,59	0,54	0,50	0,52
Ikan/Udang/Cumi/Kepiting	3,14	3,44	5,57	6,03	6,20	4,91	5,08
Daging	0,00	0,26	2,01	3,25	4,41	6,12	5,75
Telur dan Susu	0,00	2,56	2,85	3,83	5,21	6,33	6,04
Sayur-sayuran	6,80	11,92	10,77	9,92	8,79	6,66	7,09
Kacang-kacangan	2,22	5,44	3,90	3,43	2,84	2,27	2,41
Buah-buahan	1,31	0,65	2,97	4,29	4,55	5,51	5,32
Minyak dan Lemak	2,61	4,38	4,13	4,12	3,58	2,30	2,54
Bahan Minuman	5,75	3,23	3,93	3,59	3,13	2,49	2,63
Bumbu-bumbuan	2,75	1,81	1,81	1,91	1,92	1,44	1,51
Konsumsi Lainnya	0,00	1,23	1,94	1,60	1,49	1,31	1,35
Makanan dan Minuman Jadi	19,22	13,59	18,19	22,18	26,74	38,39	36,20
Tembakau dan Sirih	0,00	6,89	6,90	8,39	9,87	8,70	8,75
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Dari segi budaya, pergeseran ini dikhawatirkan menjadi pertanda bahwa masyarakat semakin menyukai hal-hal yang bersifat instan dan praktis. Selain itu, dari segi keamanan pangan, ada beberapa isu yang harus menjadi perhatian. Makanan jadi banyak digemari karena kepraktisannya. Teknologi pangan yang berkembang pesat telah memudahkan konsumen

untuk menyantap beragam produk pangan kapan pun dengan cita rasa yang bervariasi.

Sementara itu, kelompok konsumsi tembakau dan sirih di perdesaan mencapai 9,73 persen sedikit lebih tinggi dibandingkan di daerah perkotaan. Begitu juga untuk kelompok konsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan, proporsi pengeluaran di perdesaan melebihi konsumsi di perkotaan, yaitu sebesar 8,59 persen dan 5,88 persen. Tingginya persentase konsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan di perdesaan diduga karena kemudahan penduduk perdesaan untuk memperoleh kedua jenis konsumsi makanan tersebut, selain harga yang lebih rendah tentunya.

Tabel 6 menyajikan persentase rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk Bali menurut sub kelompok makanan dan kelompok rata-rata pengeluaran. Sama seperti tahun sebelumnya, kelompok pengeluaran terendah di tahun 2014 berada pada kelompok Rp.100.000,00—Rp.149.999,00 per kapita per bulan. Kondisi ini mengalami peningkatan dari tahun 2009. Pada tahun 2009 masih terdapat penduduk yang berada pada kelompok pengeluaran konsumsi makanan di bawah Rp.100.000,00. Hal ini mengindikasikan bahwa telah terjadi peningkatan pendapatan di masyarakat. Dengan kata lain, tingkat kesejahteraan penduduk di Provinsi Bali semakin membaik dari tahun ke tahun.

Menurut beberapa literatur dan tren data yang ada, terdapat indikasi bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan penduduk yang ditandai dengan semakin besarnya total pengeluaran, maka proporsi pengeluaran yang digunakan untuk konsumsi padi-padian akan semakin kecil atau bisa dikatakan bahwa konsumsi penduduk pada kelompok padi-padian dan umbi-umbian akan mengalami penurunan seiring dengan meningkatnya kelompok pengeluaran. Seperti yang ditunjukkan pada tabel 6, persentase konsumsi padi-padian semakin menurun seiring dengan peningkatan pendapatan.

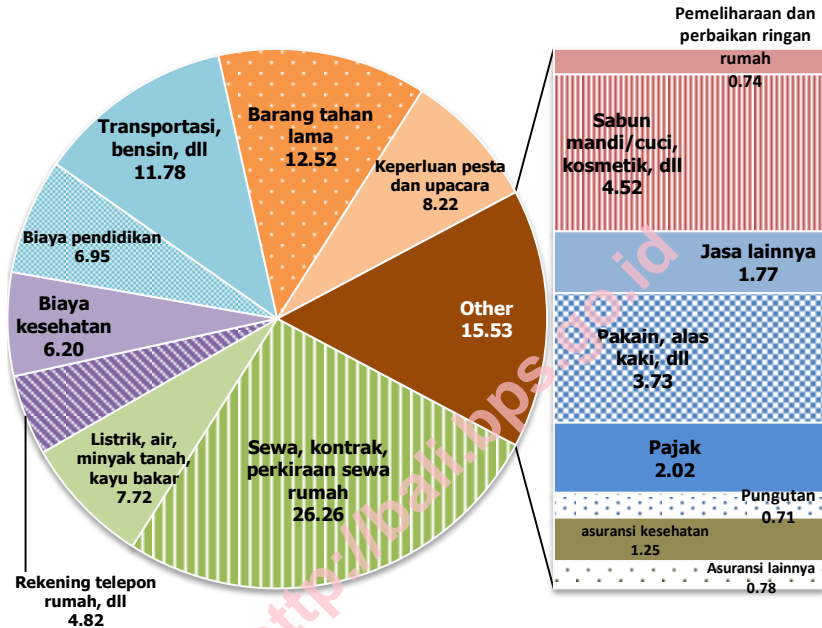
Pengeluaran konsumsi jenis protein (ikan/udang/cumi/kepiting, daging, telur dan susu) meningkat secara signifikan sejalan dengan meningkatnya kelompok pengeluaran. Hal ini menyangkut kemampuan daya beli penduduk untuk membeli jenis komoditi tersebut mengingat harga sebagai pertimbangannya, selain faktor gizi sebagai penunjang kesehatan badan.

4.2.2. KONSUMSI NON MAKANAN

Penghitungan pengeluaran non makanan dihitung menggunakan *delivery approach*. Artinya, yang dihitung sebagai konsumsi/pengeluaran adalah barang-barang yang sudah diperoleh/digunakan/dibeli (meskipun belum lunas) oleh anggota rumah tangga selama masa referensi (sebulan yang lalu). Secara garis besar, konsumsi non makanan di bagi menjadi enam sub kelompok, yaitu sub kelompok perumahan (terdiri dari pengeluaran untuk sewa, kontrak, imputasi sewa rumah, pengeluaran untuk pemeliharaan dan perbaikan ringan, pengeluaran listrik dan pengeluaran telepon), sub kelompok aneka barang dan jasa (terdiri dari sub kelompok sabun dan kosmetik, biaya kesehatan, biaya pendidikan, biaya transportasi dan jasa lainnya), sub kelompok pakaian, sub kelompok barang tahan lama, sub kelompok pajak, pungutan, dan asuransi, serta yang terakhir adalah sub kelompok pesta.

Pada dasarnya kebutuhan non makanan menjadi prioritas kedua bagi individu dalam pemenuhan kebutuhannya. Artinya, pengeluaran untuk konsumsi non makanan akan dilakukan setelah terpenuhinya kebutuhan konsumsi makanan. Tahun 2014, rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk Provinsi Bali untuk kelompok non makanan mencapai Rp.639.026,00, meningkat sebesar Rp.67.146,00 atau sekitar 11,74 persen dibanding tahun 2013.

Gambar 5.
Proporsi Pengeluaran per Kapita per Bulan Penduduk
Menurut Sub Kelompok Non Makanan di Provinsi Bali, 2014



Pengeluaran untuk perumahan masih menjadi kebutuhan yang utama sehingga menempati persentase tertinggi, yaitu 39,54 persen. Kondisi ini juga menggambarkan bahwa biaya pengeluaran untuk properti di Provinsi Bali memang cukup tinggi. Pengeluaran yang cukup tinggi berikutnya adalah kelompok aneka barang dan jasa, yaitu sebesar 31,22 persen. Biaya transportasi, baik untuk sekedar pembelian bahan bakar, perbaikan dan perawatan, maupun sewa kendaraanlah yang memberi sumbangan tertinggi pada kelompok jenis pengeluaran ini. Konsumsi untuk pembelian barang tahan lama menempati urutan tertinggi berikutnya, yaitu 12,52 persen, sedangkan pengeluaran untuk keperluan pesta dan upacara sebesar 8,22 persen. Tingginya persentase pada pengeluaran jenis ini disebabkan oleh

mayoritas penduduk Bali menganut agama Hindu yang upacara dan ritual keagamaannya sangat kental dalam pelaksanaan menjalankan ibadahnya. Sementara itu, kelompok non makanan yang menempati proporsi terendah adalah pengeluaran untuk kelompok pakaian, yaitu sebesar 3,73 persen.

Tabel 7.
Proporsi Pengeluaran per Kapita per Bulan Penduduk Menurut
Sub Kelompok Non Makanan dan Klasifikasi Daerah di Provinsi Bali, 2014

Jenis Komoditi	Perkotaan (%)	Perdesaan (%)
(1)	(2)	(3)
Sewa, kontrak, perkiraan sewa rumah	28,04	20,93
Pemeliharaan dan perbaikan ringan rumah	0,66	0,95
Listrik, air, minyak tanah, kayu bakar	7,01	9,87
Rekening telepon rumah, dll	5,09	4,00
Sabun mandi/cuci, kosmetik, dll	4,44	4,73
Biaya kesehatan	5,56	8,13
Biaya pendidikan	7,63	4,91
Transportasi, bensin, dll	11,52	12,54
Jasa lainnya	2,24	0,39
Pakaian, alas kaki, dll	3,68	3,88
Barang tahan lama	11,71	14,94
Pajak	1,98	2,14
Pungutan	0,67	0,84
asuransi kesehatan	1,48	0,57
Asuransi lainnya	0,94	0,32
Keperluan pesta dan upacara	7,34	10,87
Total	100,00	100,00

Proporsi pengeluaran non makanan di daerah perkotaan dan perdesaan dapat dilihat pada Tabel 7. Pengeluaran untuk sewa, kontrak, dan imputasi sewa rumah memiliki proporsi terbesar, baik di daerah

perkotaan maupun perdesaan. Di daerah perkotaan, pengeluaran untuk sewa, kontrak, dan imputasi sewa rumah mencapai 28,04 persen sedangkan di daerah perdesaan mencapai 20,93 persen. Hal ini lebih disebabkan karena faktor harga yang berbeda. Harga sewa/imputasi sewa rumah di perkotaan lebih tinggi dari daerah perdesaan.

Jika dilihat dari pengeluaran untuk keperluan pesta dan upacara, persentase di perdesaan lebih tinggi 3,25 poin dari daerah perkotaan, yaitu sebesar 10,87 persen untuk perdesaan dan 7,34 persen untuk perkotaan. Hal ini disebabkan karena adat dan budaya di perdesaan masih lebih mengikat dibanding perkotaan. Begitu juga untuk pengeluaran jenis listrik, air, minyak tanah, dan kayu bakar, pengeluaran di perdesaan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perkotaan, yaitu sebesar 9,87 persen di daerah perdesaan dan 7,01 persen di daerah perkotaan.

Tabel 8 menjelaskan tentang persentase rata-rata pengeluaran per kapita per bulan menurut kelompok pengeluarannya. Terlihat bahwa pola konsumsi non makanan untuk masing-masing kelompok pengeluaran cukup bervariasi. Pengeluaran untuk jenis komoditi sewa, kontrak, dan imputasi rumah hampir selalu menempati persentase tertinggi di setiap kelompok pengeluaran. Seperti terlihat pada tabel 8, persentase pada kelompok terendah sebesar 34,58 persen sedangkan pada kelompok tertinggi memiliki persentase sebesar 26,24 persen. Tingginya persentase pengeluaran pada kelompok jenis ini disebabkan karena tingginya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk sewa, kontrak, dan imputasi rumah milik sendiri.

Ada beberapa jenis komoditi yang meningkat secara signifikan seiring tingginya kelompok pengeluaran, di antaranya barang tahan lama, dan asuransi. Hal ini terkait dengan gaya hidup dan kebutuhan tersier yang meningkat di kelompok pengeluaran tinggi. Sementara itu, selain jenis

komoditi yang sudah tersebut di atas, mengalami fluktuasi seiring dengan semakin tingginya kelompok pengeluaran.

Tabel 8.
Persentase Rata-rata Pengeluaran per Kapita per Bulan Penduduk
Menurut Sub Kelompok Non Makanan dan Kelompok Rata-rata pengeluaran
di Provinsi Bali, 2014

Jenis Komoditi	Rata-rata Pengeluaran per Kapita per Bulan (Rupiah/Bulan)						Total
	100.000 s.d. 149.999	150.000 s.d. 199.999	200.000 s.d. 299.999	300.000 s.d. 399.999	400.000 s.d. 499.999	>= 500.000	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Sewa, kontrak, perkiraan sewa rumah	34,58	32,72	27,70	25,66	26,82	26,24	26,26
Pemeliharaan dan perbaikan ringan rumah	0,00	0,00	0,05	0,06	0,26	0,78	0,74
Listrik, air, minyak tanah, kayu bakar	24,92	26,87	21,03	16,88	14,29	7,14	7,72
Rekening telepon rumah, dll	2,03	2,07	3,42	5,93	6,95	4,73	4,82
Sabun mandi/cuci, kosmetik, dll	7,46	8,99	8,27	7,26	6,65	4,34	4,52
Biaya kesehatan	5,59	4,20	4,72	4,75	4,31	6,32	6,20
Biaya pendidikan	0,00	4,27	6,10	5,85	5,98	7,02	6,95
Transportasi, bensin, dll	5,76	4,29	11,33	14,35	14,83	11,61	11,78
Jasa lainnya	0,00	0,00	0,04	0,29	0,28	1,88	1,77
Pakaian, alas kaki, dll	6,95	3,40	3,08	3,82	4,04	3,72	3,73
Barang tahan lama	0,00	0,40	0,79	2,05	2,56	13,24	12,52
Pajak	1,02	1,28	1,88	2,00	2,04	2,02	2,02
Pungutan	7,12	0,22	0,80	0,91	0,78	0,71	0,71
asuransi kesehatan	0,00	0,00	0,04	0,04	0,20	1,33	1,25
Asuransi lainnya	0,00	0,00	0,07	0,07	0,18	0,83	0,78
Keperluan pesta dan upacara	4,58	11,30	10,70	10,08	9,83	8,10	8,22
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

4.3. DISTRIBUSI PENDAPATAN

Informasi lainnya yang dapat dikembangkan dari data pengeluaran adalah mengenai pola distribusi pendapatan yang dapat menggambarkan kondisi ketimpangan yang terjadi. Sebab, pembangunan yang sedang berjalan bukan merupakan tujuan, melainkan hanya sebagai alat dalam proses untuk menurunkan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. Jadi, berkurangnya ketidakmerataan distribusi pendapatan merupakan inti dari pembangunan. Distribusi pendapatan pada dasarnya merupakan suatu konsep mengenai penyebaran pendapatan di antara setiap orang atau rumah tangga dalam masyarakat.

Selama pertumbuhan ekonomi dan hasil-hasil dari pembangunan dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat, maka masalah ketidakmerataan distribusi pendapatan tidak akan muncul. Jika kinerja ekonomi lebih baik atau mengalami kemajuan, maka seluruh rakyat juga harus merasakan dampak kemajuan tersebut dalam bentuk naiknya pendapatan. Dengan kata lain, diharapkan terjadi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Peningkatan kualitas hidup penduduk menjadi sasaran akhir dari pelaksanaan pembangunan, baik pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, maupun bidang pembangunan lainnya. Salah satu bidang pembangunan yang cukup berperan bagi peningkatan kualitas hidup penduduk adalah pembangunan di bidang ekonomi. Keberhasilan Provinsi Bali di bidang perekonomian salah satunya tercermin dalam pertumbuhan ekonomi yang tetap stabil pada kisaran antara 5—6 persen selama lima tahun terakhir. Tercatat pada tahun 2014, ekonomi di Bali tumbuh sebesar 6,72 persen yang didorong oleh seluruh sektor ekonomi yang ada, dengan persentase terbesar penyokongnya adalah konsumsi rumah tangga, yaitu sebesar 48,88 persen. Akan tetapi, pertumbuhan

ekonomi tersebut belum mampu menurunkan tingkat pengangguran pada tahun 2014. Pada bulan Agustus 2014, tingkat pengangguran mencapai 1,90 persen, meningkat 0,07 persen dari tahun sebelumnya pada bulan yang sama.

Tak dapat dipungkiri bahwa kuantitas penduduk memberi pengaruh besar pada naiknya pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Namun, penduduk yang besar lagi berkualitas menjadi harapan bagi proses jalannya pembangunan sebab penduduk dalam hal ini tidak menjadi beban dalam pembangunan.

4.3.1. DISTRIBUSI PENDAPATAN PROVINSI BALI

Hasil Susenas tahun 2014 menunjukkan bahwa kesenjangan ekonomi di Provinsi Bali sudah tergolong dalam kategori menengah, yaitu terletak pada interval 0,35 dan 0,50, atau lebih tepatnya adalah 0,415, meningkat sebesar 0,012 poin dari tahun sebelumnya. Tentunya peningkatan nilai kesenjangan ekonomi kurang diharapkan mengingat pada dasarnya peningkatan pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk memakmurkan dan mensejahterakan masyarakatnya secara menyeluruh di setiap lapisan.

Tabel 9.
Gini Ratio Menurut Klasifikasi Daerah di Provinsi Bali, 2014

Klasifikasi Daerah		2014
(1)		(2)
Perkotaan		0,423
Perdesaan		0,344
Bali	2014	0,415
	2013	0,403
	2012 ^R	0,430

Jika dibandingkan menurut klasifikasi daerah, kesenjangan pendapatan di daerah perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan di daerah perdesaan, yaitu sebesar 0,423 untuk indeks gini rasio perkotaan dan 0,344 untuk perdesaan. Semakin tinggi tingkat gini ratio suatu wilayah mencerminkan semakin tinggi pula ketimpangan pendapatan yang terjadi di antara penduduk daerah tersebut.

Tabel 10.
Distribusi Pendapatan Menurut Klasifikasi Daerah
dan Kriteria Bank Dunia di Provinsi Bali, 2014

Klasifikasi Daerah	Kelompok Pendapatan		
	40% penduduk berpengeluaran rendah	40% penduduk berpengeluaran menengah	20% penduduk berpengeluaran tinggi
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan	14,67	37,90	47,43
Perdesaan	19,09	38,90	42,02
Bali 2014	15,49	36,54	47,98
2013	16,21	35,67	48,11

Lebih tingginya nilai indeks gini rasio di perkotaan lebih disebabkan karena sifat penduduk perkotaan yang lebih majemuk dan beragam, baik dari segi jenis pekerjaan, status ekonomi, hingga pendapatan yang mereka peroleh. Berfluktuasinya pendapatan penduduk di perkotaan disebabkan adanya rentang perbedaan pendapatan yang sangat mencolok antara penduduk yang berpendapatan rendah dengan penduduk berpendapatan tinggi. Kondisi inilah yang menjadi salah satu penyebab terjadinya ketimpangan pendapatan di masyarakat perkotaan. Namun, untuk mengetahui faktor-faktor penyebab ketimpangan pendapatan secara mendalam dibutuhkan adanya suatu kajian lebih lanjut.

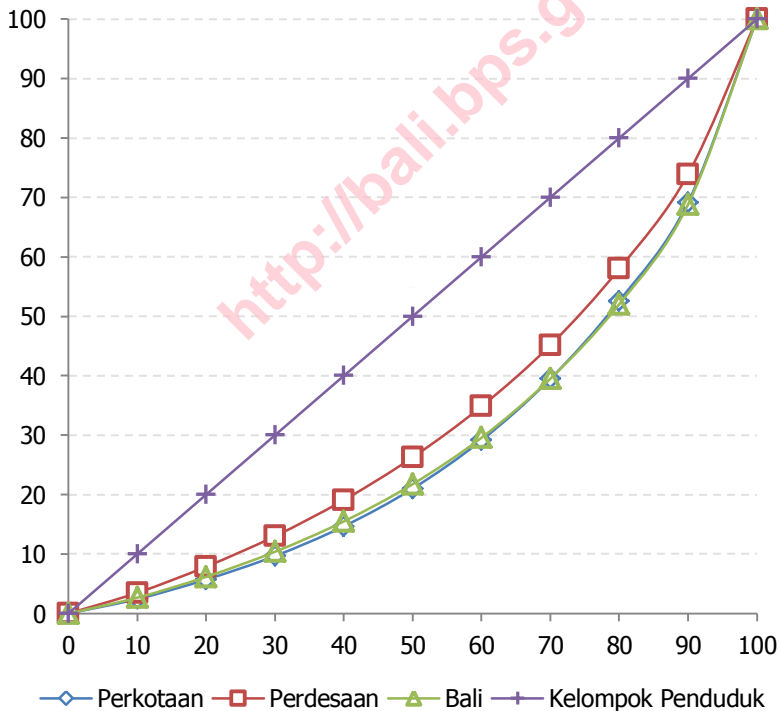
Berdasarkan Tabel 10, dapat diketahui persentase pendapatan yang diterima oleh masing-masing kelompok pendapatan penduduk pada masing-masing klasifikasi daerah. Sejalan dengan nilai gini ratio, hasil penghitungan menurut kriteria Bank Dunia juga memperlihatkan bahwa tingkat kesenjangan pendapatan di Provinsi Bali sudah masuk dalam kategori menengah. Bank Dunia memfokuskan perhatian pada perkembangan pendapatan yang diperoleh oleh penduduk yang termasuk dalam 40 persen penduduk berpendapatan rendah. Pada tahun 2013, kelompok 40 persen penduduk berpendapatan terendah menerima kurang dari 17 persen jumlah total pendapatan, yaitu sebesar 16,32 persen, sedangkan pada tahun 2014 menjadi 15,49 persen. Dengan kata lain, Bali masih berada pada kategori ketimpangan menengah (pemerataan sedang).

Berdasarkan Tabel 10 juga dapat dilihat bahwa pada tahun 2014 tingkat pemerataan pendapatan di daerah perdesaan lebih tinggi dibanding daerah perkotaan, kecuali pada kelompok 20% penduduk berpendapatan tinggi. Dengan kata lain, ketimpangan pendapatan di perkotaan lebih tinggi daripada di perdesaan untuk kelompok pendapatan 40 persen penduduk berpendapatan rendah dan 40 persen penduduk berpendapatan menengah. Hal ini terlihat dari lebih besarnya porsi pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk berpendapatan rendah dan 40 persen penduduk berpendapatan menengah di perdesaan dibanding di perkotaan. Jumlah pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk berpendapatan rendah di perdesaan mencapai 19,09 persen (masuk kategori ketimpangan distribusi pendapatan rendah karena di atas 17 persen), jauh lebih tinggi dibanding porsi pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk berpendapatan rendah di perkotaan yang hanya 14,67 persen (masuk kategori ketimpangan distribusi pendapatan sedang).

Sebagai pendukung dari kedua metode di atas, tingkat kesenjangan ekonomi di Provinsi Bali dapat divisualisasikan melalui Kurva Lorenz seperti

terlihat pada Gambar 6. Kurva Lorenz menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan suatu wilayah secara kumulatif. Kurva ini terletak di dalam sebuah bujur sangkat yang sisi tegaknya melambangkan persentase kumulatif pendapatan wilayah, sedangkan sisi datarnya mewakili persentase kumulatif penduduk. Kurva Lorenz menunjukkan bahwa garis yang mendekati garis diagonal dikatakan memiliki karakteristik pembagian pendapatan yang lebih merata.

Gambar 6.
Distribusi Pendapatan Menurut Klasifikasi Daerah
di Provinsi Bali, 2014



Sejalan dengan dua hasil penghitungan sebelumnya, tingkat pemerataan pendapatan di daerah perdesaan memang sudah lebih baik dibandingkan daerah perkotaan. Hal ini tercermin dari garis distribusi pendapatan daerah perdesaan yang lebih mendekati garis diagonal dibandingkan garis distribusi pendapatan daerah perkotaan.

Menurut beberapa pendapat, salah satu penyebab ketidakmerataan pendapatan adalah memekanisme pasar ekonomi yang ada sekarang ini. Mekanisme ini menyebabkan daerah-daerah yang relatif sudah maju, dalam hal ini perkotaan, akan semakin cepat pertumbuhan ekonominya. Sementara itu, tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang kurang maju (perdesaan) cenderung lebih lambat. Hal inilah yang memicu timbulnya ketimpangan tersebut sehingga diperlukan suatu perencanaan dan kebijakan dalam mengarahkan jalannya pembangunan yang lebih berimbang di seluruh wilayah.

4.3.2. DISTRIBUSI PENDAPATAN MENURUT KABUPATEN/KOTA

Pemerintah Bali sangat mengupayakan pembangunan dapat berjalan secara merata pada sembilan kabupaten/kota yang ada di Bali sehingga diharapkan hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat hingga ke pelosok daerah. Untuk mencapai pemerataan tersebut ternyata bukanlah persoalan yang sederhana. Diperlukan strategi-strategi pembangunan yang tepat sasaran dan berkesinambungan.

Pemahaman mengenai tingkat kesenjangan ekonomi di tingkat regional tentu sangat penting bagi perencanaan pembangunan di masa mendatang. Dengan perencanaan pembangunan yang terarah, tentu diharapkan hasil-hasil pembangunan yang lebih optimal.

Secara umum, gini ratio pada tahun 2014 di masing-masing kabupaten/kota lebih rendah dibanding nilai gini ratio untuk Provinsi Bali yang mencapai 0,415. Masih tingginya gini ratio provinsi menunjukkan

bahwa masih terjadi ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Pada Tabel 11 dapat dilihat perbandingan gini ratio di masing-masing kabupaten/kota dalam kurun waktu tahun 2012 hingga 2014. Pergerakan nilai indeks gini ratio dari tahun 2012 ke tahun 2014 sangat beragam. Ada beberapa wilayah yang berubah status ketimpangan pendapatannya, yaitu dari kategori rendah (di bawah 0,35) menjadi kategori sedang (antara 0,35—0,50), diantaranya adalah Kabupaten Tabanan, Gianyar, Klungkung, dan Buleleng. Sementara itu, wilayah lainnya tidak mengalami perubahan kategori.

Tabel 11.
Gini Ratio Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2012—2014

Kabupaten/Kota	<i>Gini Ratio</i>		
	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)
Jembrana	0,371	0,371	0,386
Tabanan	0,347	0,386	0,403
Badung	0,326	0,347	0,340
Gianyar	0,336	0,325	0,377
Klungkung	0,347	0,360	0,354
Bangli	0,305	0,307	0,329
Karangasem	0,288	0,329	0,337
Buleleng	0,333	0,376	0,393
Denpasar	0,425	0,364	0,381
Bali	0,430	0,403	0,415

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa makin beragam dan majemuknya kondisi sosial ekonomi suatu wilayah dapat memberi pengaruh pada terjadinya ketimpangan pendapatan di wilayah tersebut. Kenaikan gini ratio yang terjadi di Kabupaten Tabanan, Gianyar, Klungkung, dan Buleleng

menunjukkan adanya peningkatan kesenjangan di daerah ini. Artinya, pemerataan hasil pembangunan kurang berhasil. Hal ini dapat juga disebabkan karena sangat bervariasinya peluang/kesempatan untuk meningkatkan pendapatan, mulai dari kesempatan peningkatan pendapatan yang sangat signifikan maupun kesempatan peningkatan pendapatan yang tidak signifikan, semua lebih banyak terjadi di ketiga wilayah tersebut dibandingkan di daerah lain.

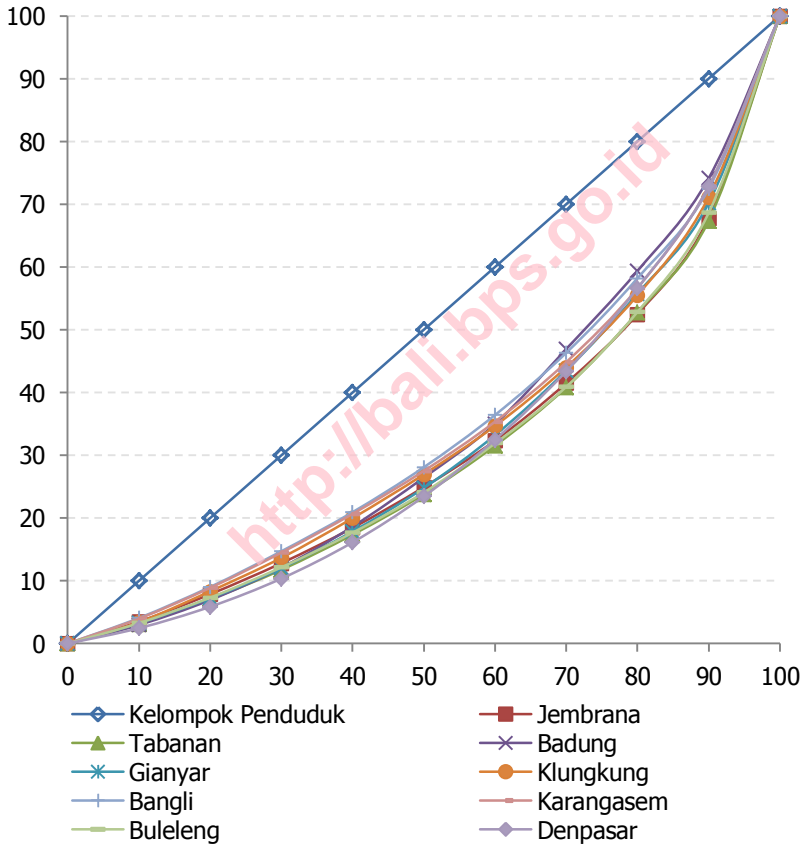
Tabel 12.
Distribusi Pendapatan Menurut Kabupaten/Kota
dan Kriteria Bank Dunia di Provinsi Bali, 2012—2014

Kabupaten/ Kota	Distribusi Pendapatan								
	40 % penduduk berpendapatan rendah			40 % penduduk berpendapatan sedang			20 % penduduk berpendapatan tinggi		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Jembrana	18,85	19,84	18,44	33,97	33,96	34,04	47,18	46,20	47,52
Tabanan	19,05	17,87	17,35	37,19	35,79	35,38	43,76	46,34	47,26
Badung	19,75	19,29	18,64	39,17	38,45	40,73	41,08	42,26	40,64
Gianyar	19,59	19,95	17,87	38,10	39,42	37,88	42,32	40,62	44,25
Klungkung	19,07	19,15	19,98	37,49	36,10	35,51	43,44	44,75	44,51
Bangli	21,60	21,67	20,94	37,69	38,16	37,27	40,71	40,17	41,80
Karangasem	23,12	20,65	20,67	36,96	36,90	35,95	39,92	42,45	43,38
Buleleng	20,27	18,80	17,66	36,79	35,31	35,17	42,94	45,89	47,17
Denpasar	16,08	17,60	16,13	33,12	39,51	40,47	50,80	42,88	43,39
Bali	16,21	16,32	15,49	35,67	36,77	36,54	48,11	46,91	47,98

Gambaran mengenai tingkat kesenjangan penduduk di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bali berdasarkan kriteria Bank Dunia dapat dilihat pada Tabel 12. Terlihat bahwa 40 persen penduduk berpendapatan rendah di seluruh kabupaten/kota pada tahun 2014 rata-rata sudah menerima lebih dari 17 persen jumlah pendapatan di daerahnya.

Artinya, distribusi pendapatan di wilayah tersebut berada pada kategori ketimpangan rendah.

Gambar 7.
Distribusi Pendapatan Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Bali, 2014



Meskipun secara rata-rata hampir seluruh wilayah kabupaten/kota di Bali masih dalam kategori ketimpangan rendah, namun kondisi ini tetap harus diwaspadai mengingat nilai persentasenya yang berfluktuasi. Keadaan

yang harus dijaga adalah jangan sampai persentase ini terus menurun yang berarti mendekati atau bahkan di bawah ambang batas minimal 17 persen.

Perbedaan ketimpangan distribusi pendapatan antar daerah disebabkan oleh pertumbuhan dan keterbatasan yang dimiliki masing-masing daerah berbeda-beda serta pembangunan yang cenderung terpusat pada daerah yang sudah maju saja. Hal inilah yang menjadi penyebab timbulnya ketimpangan distribusi pendapatan dan merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya ketimpangan yang semakin lebar.

Visualisasi distribusi pendapatan di masing-masing kabupaten/kota pada tahun 2014 ditunjukkan oleh Kurva Lorenz pada Gambar 7. Sejalan dengan nilai gini ratio dan kriteria Bank Dunia, distribusi pendapatan Kabupaten Bangli memiliki garis yang paling mendekati garis diagonal sedangkan garis yang paling jauh dari garis diagonal adalah garis distribusi pendapatan Kota Denpasar.

BAB V

PENUTUP

Dapat disimpulkan beberapa hal penting untuk menjadi bahan evaluasi pembangunan di Provinsi Bali, diantaranya:

1. Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk Provinsi Bali pada tahun 2014 mencapai Rp.1.097.749,00 mengalami kenaikan sebesar 10,43 persen dibandingkan tahun 2013. Kota Denpasar menempati urutan teratas dengan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduknya mencapai Rp.1.630.905,00. Sebaliknya, Kabupaten Karangasem dengan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan terendah, yaitu sebesar Rp.578.019,00.
2. Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk di daerah perkotaan mencapai Rp.1.302.196,00, sedangkan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk di daerah perdesaan hanya Rp.782.336,00.
3. Secara umum, pada tahun 2014 tidak ada perubahan pola konsumsi penduduk Provinsi Bali. Proporsi terbesar pengeluaran penduduk digunakan untuk konsumsi non makanan, yaitu mencapai 58,21 persen, sedangkan sisanya sebesar 41,79 persen digunakan untuk konsumsi makanan.
4. Pada tahun 2014, angka gini ratio Provinsi Bali 0,415, dengan ketimpangan yang lebih tinggi di daerah perkotaan (0,423) dibandingkan daerah perdesaan (0,344).
5. Pergerakan nilai indeks gini ratio di kabupaten/kota dari tahun 2012 ke tahun 2014 sangat beragam. Ada beberapa kabupaten/kota yang

berubah status ketimpangan pendapatannya, yaitu dari kategori rendah menjadi kategori sedang, yaitu Kabupaten Tabanan, Gianyar, Klungkung, dan Buleleng. Sementara itu, kabupaten/kota lainnya tidak mengalami perubahan.

<http://bali.bps.go.id>

LAMPIRAN

<http://pali.bps.go.id>

Tabel 13.
Rata-rata Konsumsi per Kapita per Bulan Penduduk
Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Pengeluaran di Provinsi Bali, 2014

Kabupaten/Kota	Makanan		Non Makanan		Total (Rupiah)	
	(Rupiah)	(%)	(Rupiah)	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Jembrana	360.244	48,03	389.858	51,97	750.102	
Tabanan	420.436	42,31	573.151	57,69	993.587	
Badung	562.821	39,84	849.935	60,16	1.412.756	
Gianyar	410.201	36,90	701.481	63,10	1.111.682	
Klungkung	351.207	52,38	319.257	47,62	670.463	
Bangli	346.295	50,19	343.618	49,81	689.913	
Karangasem	306.473	53,02	271.545	46,98	578.018	
Buleleng	417.052	47,94	452.890	52,06	869.942	
Denpasar	615.259	37,73	1.015.645	62,27	1.630.905	
Bali	2014	458.723	41,79	639.026	58,21	1.097.749
	2013	422.190	42,47	571.880	57,53	994.070

Tabel 14.
Rata-rata Konsumsi per Kapita per Bulan Penduduk
Menurut Kelompok Pendapatan dan Jenis Pengeluaran
di Kabupaten Jembrana, 2014

Kelompok Pendapatan Penduduk	Makanan		Non Makanan		Total (Rupiah)	
	(Rupiah)	(%)	(Rupiah)	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
40 % penduduk berpendapatan rendah	218.614	63,22	127.188	36,78	345.802	
40 % penduduk berpendapatan menengah	354.393	55,45	284.717	44,55	639.110	
20 % penduduk berpendapatan tinggi	654.350	36,81	1.123.138	63,19	1.777.488	
Total	2014	360.244	48,03	389.858	51,97	750.102
	2013	311.848	48,15	335.855	51,85	647.703

Tabel 15.
Rata-rata Konsumsi per Kapita per Bulan Penduduk
Menurut Kelompok Pendapatan dan Jenis Pengeluaran
di Kabupaten Tabanan, 2014

Kelompok Pendapatan Penduduk	Makanan		Non Makanan		Total (Rupiah)	
	(Rupiah)	(%)	(Rupiah)	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
40 % penduduk berpendapatan rendah	264.591	61,40	166.356	38,60	430.947	
40 % penduduk berpendapatan menengah	438.086	49,88	440.191	50,12	878.277	
20 % penduduk berpendapatan tinggi	697.398	29,65	1.655.080	70,35	2.352.478	
Total	2014	420.436	42,31	573.151	57,69	993.587
	2013	405.732	44,52	506.906	55,48	913.638

Tabel 16.
Rata-rata Konsumsi per Kapita per Bulan Penduduk
Menurut Kelompok Pendapatan dan Jenis Pengeluaran
di Kabupaten Badung, 2014

Kelompok Pendapatan Penduduk	Makanan		Non Makanan		Total (Rupiah)	
	(Rupiah)	(%)	(Rupiah)	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
40 % penduduk berpendapatan rendah	346.773	52,69	311.424	47,31	658.197	
40 % penduduk berpendapatan menengah	610.524	42,42	828.650	57,58	1.439.173	
20 % penduduk berpendapatan tinggi	899.311	31,36	1.968.639	68,64	2.867.950	
Total	2014	562.821	39,84	849.935	60,16	1.412.756
	2013	504.576	37,89	827.250	62,11	1.331.826

Tabel 17.
Rata-rata Konsumsi per Kapita per Bulan Penduduk
Menurut Kelompok Pendapatan dan Jenis Pengeluaran
di Kabupaten Gianyar, 2014

Kelompok Pendapatan Penduduk	Makanan		Non Makanan		Total (Rupiah)	
	(Rupiah)	(%)	(Rupiah)	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
40 % penduduk berpendapatan rendah	266.581	53,75	229.391	46,25	495.972	
40 % penduduk berpendapatan menengah	441.772	42,12	607.099	57,88	1.048.871	
20 % penduduk berpendapatan tinggi	636.822	25,63	1.848.303	74,37	2.485.125	
Total	2014	410.201	36,90	701.481	63,10	1.111.682
	2013	389.460	40,58	570.194	59,42	959.654

Tabel 18.
Rata-rata Konsumsi per Kapita per Bulan Penduduk
Menurut Kelompok Pendapatan dan Jenis Pengeluaran
di Kabupaten Klungkung, 2014

Kelompok Pendapatan Penduduk	Makanan		Non Makanan		Total (Rupiah)	
	(Rupiah)	(%)	(Rupiah)	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
40 % penduduk berpendapatan rendah	212.858	63,64	121.621	36,36	334.478	
40 % penduduk berpendapatan menengah	345.839	58,17	248.744	41,83	594.583	
20 % penduduk berpendapatan tinggi	640.390	42,72	858.757	57,28	1.499.147	
Total	2014	351.207	52,38	319.257	47,62	670.463
	2013	358.910	49,89	360.510	50,11	719.420

Tabel 19.
Rata-rata Konsumsi per Kapita per Bulan Penduduk
Menurut Kelompok Pendapatan dan Jenis Pengeluaran
di Kabupaten Bangli, 2014

Kelompok Pendapatan Penduduk	Makanan		Non Makanan		Total (Rupiah)	
	(Rupiah)	(%)	(Rupiah)	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
40 % penduduk berpendapatan rendah	231.401	64,04	129.943	35,96	361.343	
40 % penduduk berpendapatan menengah	353.544	55,05	288.663	44,95	642.206	
20 % penduduk berpendapatan tinggi	561.573	33,93	881.049	61,07	1.442.622	
Total	2014	346.295	50,19	343.618	49,81	689.913
	2013	307.578	50,03	307.183	49,97	614.761

Tabel 20.
Rata-rata Konsumsi per Kapita per Bulan Penduduk
Menurut Kelompok Pendapatan dan Jenis Pengeluaran
di Kabupaten Karangasem, 2014

Kelompok Pendapatan Penduduk	Makanan		Non Makanan		Total (Rupiah)	
	(Rupiah)	(%)	(Rupiah)	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
40 % penduduk berpendapatan rendah	189.972	63,62	108.625	36,38	298.598	
40 % penduduk berpendapatan menengah	305.506	58,64	215.491	41,36	520.997	
20 % penduduk berpendapatan tinggi	540.250	43,31	707.009	56,69	1.247.258	
Total	2014	306.473	53,02	271.545	46,98	578.018
	2013	302.525	54,23	255.381	45,77	557.906

Tabel 21.
Rata-rata Konsumsi per Kapita per Bulan Penduduk
Menurut Kelompok Pendapatan dan Jenis Pengeluaran
di Kabupaten Buleleng, 2014

Kelompok Pendapatan Penduduk	Makanan		Non Makanan		Total (Rupiah)	
	(Rupiah)	(%)	(Rupiah)	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
40 % penduduk berpendapatan rendah	238.071	62,07	145.512	37,93	383.582	
40 % penduduk berpendapatan menengah	421.225	54,95	345.350	45,05	766.576	
20 % penduduk berpendapatan tinggi	766.650	37,43	1.281.821	62,57	2.048.471	
Total	2014	417.052	47,94	452.890	52,06	869.942
	2013	354.023	47,65	388.892	52,35	742.915

Tabel 22.
Rata-rata Konsumsi per Kapita per Bulan Penduduk
Menurut Kelompok Pendapatan dan Jenis Pengeluaran
di Kota Denpasar, 2014

Kelompok Pendapatan Penduduk	Makanan		Non Makanan		Total (Rupiah)	
	(Rupiah)	(%)	(Rupiah)	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
40 % penduduk berpendapatan rendah	341.192	51,92	315.992	48,08	657.184	
40 % penduduk berpendapatan menengah	703.308	42,70	943.891	57,30	1.647.199	
20 % penduduk berpendapatan tinggi	989.534	27,81	2.568.527	72,19	3.558.061	
Total	2014	615.259	37,73	1.015.645	62,27	1.630.905
	2013	576.065	39,06	898.824	60,94	1.474.889

Tabel 23.
Rata-rata Konsumsi per Kapita per Bulan Penduduk
Menurut Sub Kelompok Makanan di Provinsi Bali, 2014

Kelompok Komoditi	Makanan	
	(Rupiah)	(%)
(1)	(2)	(3)
Padi-Padian	67.906	14,80
Umbi-umbian	2.405	0,52
Ikan/Udang/Cumi/Kepiting	23.314	5,08
Daging	26.381	5,75
Telur dan Susu	27.699	6,04
Sayur-sayuran	32.519	7,09
Kacang-kacangan	11.065	2,41
Buah-buahan	24.410	5,32
Minyak dan Lemak	11.647	2,54
Bahan Minuman	12.050	2,63
Bumbu-bumbuan	6.939	1,51
Konsumsi Lainnya	6.207	1,35
Makanan dan Minuman Jadi	166.053	36,20
Tembakau dan Sirih	40.129	8,75

Tabel 24.
Rata-rata Konsumsi per Kapita per Bulan Penduduk
Menurut Sub Kelompok Non Makanan di Provinsi Bali, 2014

Kelompok Komoditi	Makanan	
	(Rupiah)	(%)
(1)	(2)	(3)
Sewa, kontrak, perkiraan sewa rumah	167.824	26,26
Pemeliharaan dan perbaikan ringan rumah	4.705	0,74
Listrik, air, minyak tanah, kayu bakar	49.354	7,72
Rekening telepon rumah, dll	30.800	4,82
Sabun mandi/cuci, kosmetik, dll	28.856	4,52
Biaya kesehatan	39.649	6,20
Biaya pendidikan	44.394	6,95
Transportasi, bensin, dll	75.246	11,78
Jasa lainnya	11.340	1,77
Pakaian, alas kaki, dll	23.832	3,73
Barang tahan lama	79.992	12,52
Pajak	12.900	2,02
Pungutan	4.567	0,71
asuransi kesehatan	8.005	1,25
Asuransi lainnya	5.009	0,78
Keperluan pesta dan upacara	52.554	8,22

Tabel 25.
Rata-rata Konsumsi Kalori dan Protein per Kapita Sehari
Menurut Sub Kelompok Bahan Makanan di Provinsi Bali, 2012—2014

Kelompok Bahan Makanan	Kalori (Kkal)			Protein (Gr)		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Padi-Padian	1.014,23	991,09	989,48	23,75	23,19	23,18
Umbi-umbian	20,63	21,35	18,03	0,20	0,20	0,19
Ikan/Udang/Cumi/Kepiting	35,07	29,00	36,64	6,07	5,08	6,30
Daging	81,64	95,41	72,68	4,43	5,10	4,12
Telur dan Susu	47,48	50,68	47,95	3,09	3,23	2,91
Sayur-sayuran	45,75	38,58	42,91	3,02	2,60	2,85
Kacang-kacangan	57,68	52,00	53,75	5,29	4,83	5,07
Buah-buahan	45,49	61,04	56,65	0,47	0,60	0,59
Minyak dan Lemak	208,38	204,54	204,30	0,15	0,17	0,13
Bahan Minuman	65,85	67,06	68,75	1,00	1,12	1,15
Bumbu-bumbuan	11,71	10,42	10,08	0,58	0,56	0,56
Konsumsi Lainnya	40,52	42,25	37,75	0,83	0,91	0,81
Makanan dan Minuman Jadi	344,41	393,36	440,57	11,25	12,81	13,87
Total	2.018,84	2.056,78	2.079,54	60,13	60,40	61,73

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Jl. Raya Puputan No. 1 Renon Denpasar 80226

Telp. (0361) 238159, Fax. (0361) 238162

Homepage: <http://bali.bps.go.id>

E-mail: bps5100@bps.go.id

ISSN 2356-4652

